

Persiapan Menghadapi Blokade Maritim: Strategi Angkatan Laut dan *Sea Denial* dalam Potensi Kontingensi Taiwan

Bima Hafizhan^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²

^{1,2}Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

E-mail: bima.hafizhan@sp.idu.ac.id^{1*}, lukman.prakoso@idu.ac.id²

*Corresponding Author

Article Info Article history: Received : 19 July 2026 Revised : 19 July 2026 Accepted : 20 July 2026 Kata Kunci: Blokade maritim, Keamanan maritim, Kontingensi Taiwan, Sea denial, Strategi angkatan laut	ABSTRACT Kontingensi Taiwan dapat berkembang melalui karantina maritim, blokade gabungan, serangan terhadap pelabuhan, dan gangguan terhadap pelayaran komersial, bukan semata-mata melalui invasi amfibi secara langsung. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi angkatan laut dan <i>sea denial</i> dapat mencegah tindakan pemaksaan tersebut mencapai efektivitas strategis. Penelitian ini menggunakan desain analisis dokumen kualitatif terhadap dua belas publikasi akademik, kajian strategis, dan dokumen pertahanan resmi yang dipilih secara purposif serta diterbitkan antara tahun 2008 dan 2026. Seluruh bahan dianalisis dan dikodekan berdasarkan bentuk blokade, kerentanan operasional, kemampuan pertahanan, dan risiko eskalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade dapat mengombinasikan operasi angkatan laut, penjaga pantai, kekuatan udara, rudal, siber, peperangan elektronik, dan operasi informasi. Kerentanan utama Taiwan meliputi ketergantungan terhadap energi impor, konsentrasi infrastruktur pelabuhan, rapuhnya kesinambungan sistem komando, serta keengganan pelayaran komersial untuk memasuki zona konflik. Penelitian ini mengusulkan konsep penyangkalan efektivitas blokade, yaitu pengembangan dari konsep <i>sea denial</i> yang mengintegrasikan kesadaran domain maritim yang tangguh, kekuatan tempur terdistribusi, ketahanan pelabuhan dan energi, kesiapan pelayaran niaga, serta koordinasi militer, diplomatik, dan hukum. Kesimpulannya ialah Persiapan menghadapi blokade membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan fungsi minimum negara dan akses maritim secara berkala, bukan hanya menghancurkan kekuatan pemblokade. Bagi Indonesia, skenario tersebut menegaskan pentingnya perlindungan jalur komunikasi laut, ketahanan rantai pasok, perencanaan evakuasi warga negara, dan pengelolaan eskalasi di kawasan.
---	---

PENDAHULUAN

Ketegangan di Selat Taiwan merupakan salah satu persoalan keamanan paling kompleks di Indo-Pasifik karena mempertemukan kepentingan politik, ekonomi, dan militer kekuatan besar pada ruang laut yang menjadi jalur penting perdagangan internasional. Pembahasan kontingensi Taiwan sering berpusat pada kemungkinan invasi amfibi. Namun, Beijing memiliki pilihan koersif lain yang dapat diterapkan secara

bertahap, mulai dari patroli zona abu-abu, pemeriksaan kapal, karantina maritim, blokade gabungan, hingga serangan presisi terhadap pelabuhan. Pilihan tersebut memungkinkan tekanan terhadap Taiwan tanpa harus segera menanggung tingkat kesulitan dan risiko politik dari operasi pendaratan besar.

Laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengidentifikasi kampanye blokade gabungan sebagai salah satu opsi militer yang dipertimbangkan Tiongkok. Kampanye tersebut dapat memutus lalu lintas laut dan udara serta impor vital selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Operasi blokade juga berpotensi disertai serangan rudal, perebutan pulau terluar, peperangan elektronik, serangan jaringan, dan operasi informasi untuk mengisolasi Taiwan serta mengendalikan narasi internasional (U.S. Department of Defense, 2025). Karena itu, blokade tidak dapat dipahami hanya sebagai barisan kapal perang yang menjaga garis geografis tertentu, melainkan sebagai operasi multidomain untuk mengubah kalkulasi politik dan daya tahan masyarakat.

Perbedaan antara karantina dan blokade penting dalam menentukan respons. Karantina merupakan operasi yang secara dominan dipimpin lembaga penegakan hukum untuk mengontrol atau memeriksa lalu lintas, sedangkan blokade merupakan kampanye militer yang secara signifikan membatasi arus menuju Taiwan. Penggunaan penjaga pantai dapat menciptakan ambiguitas karena Beijing dapat menggambarkan tindakannya sebagai urusan penegakan hukum domestik. Taiwan dan negara mitra kemudian dihadapkan pada pilihan sulit antara menerima pembatasan atau menggunakan kekuatan untuk menentangnya, yang berpotensi membuat pihak penentang terlihat sebagai pemicu eskalasi (Lin et al., 2024a).

Kajian lain menunjukkan bahwa Tiongkok juga dapat menggunakan serangan rudal terhadap pelabuhan untuk menciptakan *blockade by fire*. Dalam skenario tersebut, kapal dan pesawat pemblokade tidak perlu mempertahankan garis intersepsi secara terus-menerus. Serangan berkala terhadap dermaga, terminal energi, fasilitas bongkar muat, dan kapal yang mendekati Taiwan dapat menaikkan risiko komersial sampai perusahaan pelayaran, penanggung asuransi, dan awak kapal menghentikan layanan. Davis dan Gholz (2026) menunjukkan bahwa kemampuan menimbulkan efek blokade dapat dibangun melalui ancaman tembakan terhadap pelabuhan meskipun penutupan laut tidak sempurna.

Kerentanan Taiwan diperbesar oleh ketergantungan terhadap impor energi. Kepe dan Harold (2025) mencatat bahwa lebih dari 96 persen bahan bakar fosil yang digunakan Taiwan pada 2023 berasal dari impor. Pada 2024, pembangkit berbahan bakar gas dan batu bara masih menghasilkan sebagian besar listrik Taiwan. Dengan demikian, terminal gas alam cair, pelabuhan energi, jaringan distribusi, cadangan bahan bakar, dan kapal pengangkut energi merupakan bagian dari arsitektur pertahanan nasional. Kerusakan terhadap simpul tersebut dapat memengaruhi komunikasi, industri, layanan kesehatan, mobilitas, dan kemampuan operasi militer.

Dalam teori strategi laut, *sea control* merujuk pada kemampuan menggunakan ruang laut bagi kepentingan sendiri sekaligus membatasi penggunaan oleh lawan, sedangkan *sea denial* lebih terbatas pada pencegahan terhadap penggunaan laut oleh lawan tanpa

menuntut kontrol permanen. Biddle dan Oelrich (2016) menunjukkan bahwa geografi kepulauan, kemampuan sensor, dan senjata presisi dapat membatasi kebebasan operasi angkatan laut di Pasifik Barat. Bagi pihak yang menghadapi lawan dengan kekuatan lebih besar, *sea denial* menawarkan cara untuk meningkatkan risiko dan biaya melalui rudal antikapal berbasis darat, kapal selam, ranjau, kapal kecil, sistem nirawak, dan jaringan sensor tersebar.

Strategi asimetris Taiwan yang dikemukakan Murray (2008) juga menolak respons simetris terhadap modernisasi militer Tiongkok. Taiwan dinilai perlu memprioritaskan kemampuan yang dapat bertahan dari serangan awal, bergerak, tersebar, sulit dideteksi, dan tetap memberikan ancaman setelah pangkalan utama diserang. Namun, sebagian literatur masih menempatkan *sea denial* terutama sebagai persoalan menghancurkan atau menghalangi platform tempur lawan. Sementara itu, penelitian mengenai blokade menunjukkan bahwa keberhasilan pertahanan juga bergantung pada pelabuhan, energi, pelayaran niaga, asuransi, komunikasi sipil, diplomasi, dan legitimasi hukum (Cancian et al., 2025; Henley, 2023).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep penyangkalan efektivitas blokade, yaitu penerapan *sea denial* yang tidak hanya bertujuan menimbulkan kerugian pada armada pemblokade, tetapi juga mempertahankan fungsi minimum pemerintahan, membuka akses laut secara periodik, menjaga operasi pelabuhan alternatif, dan mempertahankan arus barang strategis. Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) bagaimana karakter blokade maritim yang mungkin digunakan dalam kontingensi Taiwan dan (2) bagaimana strategi angkatan laut dan *sea denial* dapat dipersiapkan untuk mencegah blokade mencapai tujuan politiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis dokumen. Penelitian dilaksanakan pada Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, selama Juni-Juli 2026. Objek penelitian bukan populasi manusia, melainkan publikasi akademik, dokumen pertahanan resmi, dan laporan penelitian strategis yang membahas blokade, strategi laut, ketahanan Taiwan, hukum konflik bersenjata di laut, dan pengendalian eskalasi.

Populasi data mencakup publikasi berbahasa Inggris yang dapat ditelusuri secara terbuka. Sampel inti terdiri atas dua belas sumber yang dipilih secara purposif, yaitu empat artikel jurnal ilmiah, lima laporan lembaga penelitian atau pendidikan militer, dua kajian CSIS mengenai karantina dan blokade Taiwan, serta satu dokumen resmi pertahanan Amerika Serikat. Rentang publikasi adalah 2008-2026. Sumber lama dipertahankan apabila mempunyai nilai konseptual utama, khususnya mengenai pertahanan asimetris dan *sea denial*.

Pemilihan sumber menggunakan empat kriteria: relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian, identitas penulis dan penerbit yang jelas, ketersediaan tautan yang dapat diverifikasi, serta kontribusi terhadap dimensi operasional, logistik, hukum, atau politik. Artikel populer tanpa metodologi yang jelas, publikasi anonim, dan sumber yang hanya mengulang laporan lain tidak dimasukkan sebagai rujukan inti.

Analisis dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama, setiap dokumen dikodekan berdasarkan bentuk tekanan, yaitu zona abu-abu, karantina, blokade gabungan, *blockade by fire*, dan transisi menuju invasi. Kedua, kerentanan dikelompokkan menjadi kekuatan tempur, komando dan komunikasi, pelabuhan, energi, logistik, pelayaran niaga, hukum, dan kemauan politik. Ketiga, temuan dibandingkan untuk menyusun strategi penyangkalan efektivitas blokade. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi antara artikel ilmiah, dokumen resmi, dan hasil permainan perang. Keterbatasan metode adalah tidak digunakannya data operasi rahasia dan tidak dilakukannya simulasi kuantitatif mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spektrum Blokade dalam Kontingensi Taiwan

Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman blokade terhadap Taiwan berada pada sebuah spektrum. Pada tahap zona abu-abu, tekanan dapat berupa peningkatan patroli, latihan pengepungan, pelanggaran garis median, serangan siber, gangguan komunikasi, dan disinformasi. Tujuannya adalah mengikis kesiapan dan kepercayaan publik tanpa menimbulkan indikator yang cukup jelas untuk memicu respons militer kolektif. Pola ini memungkinkan tekanan menjadi rutinitas sehingga kehadiran kapal dan pesawat dalam jumlah besar tidak lagi selalu diperlakukan sebagai tanda serangan.

Tahap berikutnya adalah karantina maritim. Dalam skenario ini, penjaga pantai dan badan keselamatan maritim dapat meminta kapal melapor, menjalani pemeriksaan, mengubah rute, atau memperoleh izin sebelum memasuki pelabuhan Taiwan. Lin et al. (2024a) menilai bahwa karantina lebih mudah dilaksanakan dalam jangka dekat dibandingkan invasi atau blokade militer penuh karena tidak harus menutup seluruh pulau. Efeknya tetap dapat besar apabila perusahaan pelayaran menghindari Taiwan karena ketidakpastian hukum, keterlambatan, atau risiko penahanan.

Blokade gabungan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kajian Lin et al. (2024b) menunjukkan bahwa kampanye tersebut dapat memadukan kapal permukaan dan kapal selam, kekuatan udara, rudal konvensional, pertahanan pantai dan udara, unsur pendukung, penjaga pantai, serta milisi maritim. Operasi ini berupaya memperoleh keunggulan informasi, laut, dan udara sebelum melakukan intersepsi yang lebih ketat. Serangan terhadap pertahanan udara, pelabuhan, jalur pelayaran, dan sistem komando dapat digunakan untuk mengurangi risiko terhadap kekuatan pemblokade.

Bentuk yang paling sulit diidentifikasi melalui definisi tradisional adalah *blockade by fire*. Davis dan Gholz (2026) menjelaskan bahwa serangan rudal terhadap pelabuhan dapat menimbulkan efek penutupan meskipun Tiongkok tidak menghentikan setiap kapal. Efektivitas blokade dalam konteks ini berasal dari keputusan aktor komersial. Apabila risiko kerusakan kapal dan kematian awak dinilai lebih besar daripada keuntungan, akses akan menyusut dengan sendirinya. Oleh karena itu, kesiapan menghadapi blokade harus mencakup insentif, jaminan risiko, dan kapasitas pelayaran nasional, bukan hanya pertempuran antarkapal perang.

Spektrum tersebut memperlihatkan bahwa batas antara damai dan perang tidak selalu tegas. Respons yang terlalu keras terhadap operasi penjaga pantai dapat mempercepat eskalasi, sedangkan respons yang terlalu pasif memungkinkan karantina berkembang menjadi fakta baru. Karena itu, pemerintah memerlukan indikator perubahan tahap, aturan pelibatan, pembagian kewenangan antara angkatan laut dan penjaga pantai, serta mekanisme komunikasi dengan kapal niaga dan negara bendera.



Figure 1. Spektrum ancaman blokade dan pilar penyangkalan efektivitas blokade
(Source: Diolah oleh penulis, 2026)

Sea Denial dan Konsep Penyangkalan Efektivitas Blokade

Sea denial relevan bagi Taiwan karena keberhasilan tidak mensyaratkan penguasaan laut secara menyeluruh. Angkatan laut yang lebih kecil dapat memaksa lawan beroperasi secara hati-hati melalui ancaman kapal selam, rudal antikapal, ranjau, kapal cepat, dan sistem nirawak. Biddle dan Oelrich (2016) mengingatkan bahwa rantai deteksi dan penyerangan tidak selalu bekerja sempurna dalam lingkungan tempur. Gangguan sensor, penyamaran, umpan, peperangan elektronik, cuaca, dan kesalahan identifikasi dapat mengurangi efektivitas kekuatan yang secara material lebih unggul.

Namun, blokade menciptakan ukuran keberhasilan yang berbeda dari pertempuran armada. Lawan tidak harus menghancurkan seluruh kekuatan Taiwan; cukup membuat arus impor, energi, dan bantuan turun di bawah tingkat yang dapat menopang pemerintahan dan masyarakat. Sebaliknya, Taiwan tidak perlu menenggelamkan seluruh kapal pemblokade. Blokade kehilangan efektivitas strategis apabila akses tertentu tetap terbuka, pelabuhan dapat dipulihkan, pasokan minimum dapat masuk, dan tekanan tidak mematahkan kemauan politik.

Konsep penyangkalan efektivitas blokade dalam penelitian ini memiliki enam indikator. Pertama, pemerintahan dan sistem komando tetap berjalan. Kedua, kekuatan pertahanan yang selamat masih mampu mengancam pemblokade. Ketiga, sekurang-kurangnya satu atau lebih koridor laut dapat digunakan secara periodik. Keempat, pelabuhan alternatif atau fasilitas bongkar muat darurat dapat berfungsi. Kelima, pasokan energi, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan militer tidak sepenuhnya terputus. Keenam,

dukungan internasional serta keberadaan pelayaran niaga atau bantuan kemanusiaan tetap dapat dipertahankan.

Konsep ini melengkapi pendekatan asimetris Murray (2008). Sistem senjata yang tersebar memang meningkatkan daya tahan tempur, tetapi keberhasilan pertahanan memerlukan integrasi dengan sektor sipil. Kapal perang tidak dapat menggantikan operator terminal, awak kapal niaga, teknisi jaringan listrik, perusahaan asuransi, dan tim perbaikan pelabuhan. Dengan demikian, *sea denial* harus diposisikan sebagai strategi nasional lintas domain, bukan sekadar fungsi taktis angkatan laut.

Lima Pilar Persiapan Strategis

Kesadaran domain maritim dan komando yang tangguh

Pilar pertama adalah sistem pengawasan dan komando yang tetap bekerja di tengah serangan. Gambaran situasi laut perlu dibangun dari radar pantai, satelit, pesawat nirawak, sonar, data kapal sipil, dan informasi mitra. Ketergantungan pada satu pusat komando atau satu jalur komunikasi akan menciptakan titik kegagalan tunggal. Karena itu, pusat komando perlu didistribusikan dan memiliki jaringan cadangan berbasis radio, satelit, serta prosedur operasi ketika konektivitas digital terganggu.

Informasi juga harus dapat diterjemahkan menjadi keputusan lintas lembaga. Angkatan laut, penjaga pantai, pengelola pelabuhan, badan energi, bea cukai, perusahaan pelayaran, dan tim penyelamatan membutuhkan gambaran situasi yang sama, tetapi dengan tingkat klasifikasi yang sesuai. Tanpa mekanisme berbagi informasi, keunggulan sensor tidak otomatis menghasilkan ketahanan pelabuhan atau keselamatan kapal niaga.

Kekuatan tempur terdistribusi dan berdaya tahan

Pilar kedua adalah mempertahankan ancaman tempur setelah serangan pembuka. Platform yang terkonsentrasi pada pangkalan besar mudah dijadikan sasaran. Rudal pesisir bergerak, kapal cepat, kapal selam, ranjau, sistem nirawak, persediaan amunisi, dan fasilitas pemeliharaan perlu disebar. Desentralisasi komando harus memberi unit lapangan kewenangan bertindak berdasarkan maksud komandan ketika komunikasi terputus.

Penggunaan ranjau harus disertai peta, kontrol, dan kemampuan penanggulangan ranjau agar tidak menghambat koridor bagi kapal sendiri. Kapal selam dan sistem nirawak bernilai karena memaksa armada pemblokade mengalokasikan waktu serta aset untuk pencarian. Prioritasnya bukan menghabiskan seluruh kekuatan dalam pertempuran awal, melainkan mempertahankan ketidakpastian yang terus meningkatkan biaya blokade. Hammes (2012) menempatkan ranjau, kapal selam, pertahanan udara terbatas, dan kerja sama sekutu sebagai unsur penting strategi penyangkalan di rantai kepulauan pertama.

Ketahanan pelabuhan, energi, dan logistik

Pilar ketiga berasal dari temuan bahwa blokade pada dasarnya merupakan kompetisi logistik. Kepe dan Harold (2025) menunjukkan bahwa ketergantungan energi Taiwan membuat gangguan lalu lintas maritim berpengaruh langsung terhadap layanan vital. Pelabuhan dan terminal energi kemungkinan menjadi sasaran awal, baik melalui

serangan kinetik maupun sabotase. Oleh sebab itu, pertahanan perlu mencakup alat bongkar muat bergerak, pasokan listrik cadangan, pembersihan ranjau, tim perbaikan dermaga, fasilitas pemadam kebakaran, suku cadang, dan jalur distribusi darat alternatif.

Cadangan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah hari, tetapi juga berdasarkan penyebaran dan kemampuan distribusi. Gudang yang besar namun terpusat dapat kehilangan nilai setelah satu serangan. Persediaan energi, pangan, obat-obatan, amunisi, dan komponen komunikasi perlu ditempatkan pada beberapa lokasi yang terlindungi. Pemerintah juga harus menyiapkan prioritas konsumsi, mekanisme pengurangan beban listrik, dan perlindungan terhadap simpul distribusi.

Permainan perang CSIS memperlihatkan bahwa kesiapan energi Taiwan, kemampuan mempertahankan pelabuhan, dan keberadaan kapal niaga sangat menentukan hasil blokade. Dua puluh enam permainan perang yang dilakukan menunjukkan bahwa blokade dapat menghasilkan pertempuran konvoi besar, kerugian tinggi, dan risiko eskalasi bagi seluruh pihak. Persiapan sebelum konflik memberikan pengaruh yang lebih besar daripada improvisasi setelah akses laut terputus (Cancian et al., 2025).

Pelayaran niaga dan operasi konvoi

Pilar keempat adalah kesiapan sektor pelayaran komersial. Kapal niaga tidak otomatis memasuki wilayah konflik hanya karena memperoleh pengawalan. Keputusan dipengaruhi oleh keselamatan awak, kontrak, asuransi, negara bendera, ketersediaan pelabuhan, dan kemampuan penyelamatan. Karena itu, pemerintah perlu membuat daftar kapal yang dapat dimobilisasi, kontrak darurat, jaminan kompensasi, mekanisme asuransi perang, prioritas muatan, dan prosedur keselamatan awak sejak masa damai.

Konvoi bukan sekadar penempatan kapal perang di samping kapal dagang. Operasi ini membutuhkan intelijen rute, pertahanan udara, perlindungan antisubmarin, pembersihan ranjau, komunikasi aman, pengaturan pelabuhan, dan pencarian serta penyelamatan. Henley (2023) menekankan bahwa blokade berpotensi berkepanjangan. Oleh karena itu, keberhasilan tidak seharusnya bergantung pada satu penerobosan besar, tetapi pada kemampuan mengirim pasokan terbatas secara berulang melalui koridor dan waktu yang berubah.

Diplomasi, hukum, dan komunikasi strategis

Pilar kelima adalah integrasi kekuatan militer dengan legitimasi politik dan hukum. Pihak yang menghadapi blokade harus mendokumentasikan pemeriksaan, pengalihan, penyerangan, kerusakan kapal sipil, dan hambatan bantuan kemanusiaan. Dokumentasi yang dapat diverifikasi diperlukan untuk memperoleh dukungan negara pemilik kapal, negara bendera, perusahaan asuransi, organisasi internasional, dan masyarakat global.

San Remo Manual menegaskan bahwa blokade harus diumumkan dan diberlakukan secara efektif serta tidak boleh bertujuan membuat penduduk sipil kelaparan. Blokade juga dilarang apabila kerusakan terhadap penduduk sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Aturan mengenai bantuan kemanusiaan menjadi penting ketika pangan dan kebutuhan esensial tidak mencukupi (Doswald-Beck, 1995). Walaupun status politik Taiwan menimbulkan kompleksitas

diplomatik, prinsip perlindungan penduduk sipil dan kehati-hatian terhadap pelayaran netral tetap relevan dalam penilaian tindakan di laut.

Komunikasi strategis harus menjelaskan perbedaan antara kebebasan navigasi, bantuan kemanusiaan, dan intervensi militer. Narasi yang tidak konsisten dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan penerobosan sebagai agresi. Di sisi lain, transparansi berlebihan mengenai rute dan jadwal konvoi dapat membahayakan operasi. Karena itu, komunikasi publik, diplomasi tertutup, dan keamanan operasi harus direncanakan secara terpadu.

Table 1. Tahapan ancaman blokade dan prioritas respons

Tahap	Karakter ancaman	Tujuan pertahanan	Prioritas kemampuan
Zona abu-abu	Patroli, latihan, serangan siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi.	Mencegah normalisasi tekanan dan menjaga kesadaran situasional.	MDA, perlindungan siber, komunikasi publik, dan dokumentasi.
Karantina	Pemeriksaan, pengalihan kapal, dan pembatasan pelabuhan oleh unsur penegakan hukum.	Mempertahankan akses tanpa memicu eskalasi prematur.	Penjaga pantai, prosedur hukum, diplomasi, dan koordinasi pelayaran.
Blokade gabungan	Pengerahan angkatan laut, udara, rudal, kapal selam, ranjau, dan peperangan elektronik.	Menyangkal penutupan laut yang stabil.	Kekuatan tersebar, rudal pesisir, kapal selam, penanggulangan ranjau, dan konvoi.
Blockade by fire	Serangan terhadap pelabuhan, terminal energi, navigasi, dan kapal yang mendekat.	Mempertahankan fungsi minimum pelabuhan dan menurunkan efek risiko komersial.	Pertahanan udara, perbaikan cepat, fasilitas bergerak, dan pelabuhan alternatif.
Transisi invasi	Blokade disertai serangan luas dan persiapan pendaratan.	Menjaga pemerintahan, kekuatan tempur, dan kedalaman pertahanan.	Mobilisasi, cadangan strategis, pertahanan pantai, dan kontinuitas komando.

(Source: Diolah oleh penulis berdasarkan U.S. Department of Defense, 2025; Lin et al., 2024a, 2024b; Davis & Gholz, 2026)

Pengendalian Eskalasi

Blokade berada pada anak tangga eskalasi yang berbahaya karena penerobosan dapat berubah menjadi pertempuran antarkapal, serangan terhadap pangkalan, dan perluasan konflik. Cunningham (2020) menunjukkan bahwa blokade laut dapat memberi waktu untuk negosiasi, tetapi juga menuntut kekuatan besar dan dukungan negara lain. Dalam kontingensi Taiwan, setiap intersepsi kapal asing dapat melibatkan negara bendera dan memperluas jumlah aktor yang berkepentingan.

Strategi penyangkalan perlu membedakan kekuatan yang secara langsung menegakkan blokade dari aset lain agar tindakan tidak berkembang menjadi serangan tanpa batas. Pemilihan sasaran, lokasi, dan skala kekuatan harus mempertimbangkan risiko perluasan konflik. Saluran komunikasi krisis, aturan pelibatan yang bertingkat, dan *off-ramp* diplomatik perlu dipertahankan. Tujuannya adalah membuat blokade tidak berhasil tanpa mengubah setiap insiden menjadi perang total.

Implikasi bagi Keamanan Maritim Indonesia

Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa Taiwan, tetapi blokade di Selat Taiwan dapat mengubah pola pelayaran dan rantai pasok Asia Timur. Kapal dapat mengalihkan rute melalui Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, atau perairan Indonesia timur. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas, risiko kecelakaan, kebutuhan pencarian dan penyelamatan, serta kehadiran militer negara besar di sekitar jalur laut Indonesia.

Pelajaran pertama bagi Indonesia adalah pentingnya kesadaran domain maritim yang terintegrasi. TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai, Polairud, Basarnas, serta lembaga intelijen perlu memiliki prosedur berbagi informasi ketika terjadi perubahan arus pelayaran dan aktivitas militer regional. Sistem tersebut harus dapat mengidentifikasi kapal niaga Indonesia, memberikan peringatan navigasi, dan membedakan ancaman militer dari risiko keselamatan pelayaran.

Dalam dimensi pertahanan, TNI Angkatan Laut perlu menempatkan *sea denial* sebagai kemampuan defensif untuk menjaga ruang gerak nasional, bukan sebagai komitmen otomatis untuk memasuki konflik. Persiapan dapat diarahkan pada pengawasan choke point, penyebaran sensor dan unsur patroli, perlindungan pangkalan, penanggulangan ranjau, pertahanan terhadap kapal selam, serta kemampuan mempertahankan komunikasi ketika terjadi gangguan elektronik. Pendekatan ini memberikan pilihan respons yang bertingkat, mulai dari pemantauan, perlindungan pelayaran, bantuan kemanusiaan, sampai pengamanan perairan yurisdiksi Indonesia.

Ketahanan pelabuhan Indonesia juga perlu diuji terhadap lonjakan arus kapal dan kemungkinan gangguan rantai pasok. Pelabuhan utama perlu memiliki rencana kontinuitas operasi, fasilitas bongkar muat cadangan, jalur komunikasi alternatif, persediaan suku cadang, dan prosedur penanganan kapal yang mengalihkan rute. Latihan meja lintas kementerian dapat digunakan untuk menguji kewenangan, pertukaran data, prioritas sandar, dan pembagian sumber daya ketika beberapa pelabuhan menerima tekanan secara bersamaan.

Pelajaran kedua adalah ketahanan rantai pasok. Gangguan di sekitar Taiwan dapat memengaruhi energi, komponen elektronik, bahan baku industri, dan biaya asuransi. Pemerintah perlu menilai persediaan strategis, sumber alternatif, pelabuhan pengganti, dan kemampuan distribusi domestik. Sebagaimana terlihat pada Taiwan, jumlah cadangan tidak cukup apabila fasilitas penerima, jaringan listrik, atau transportasi darat mengalami gangguan.

Pelajaran ketiga adalah perlindungan warga negara dan kapal nasional. Rencana evakuasi warga negara Indonesia harus disiapkan sebelum pelabuhan dan bandar udara tertutup. Perencanaan mencakup titik pengumpulan, kapal atau pesawat angkut, dokumen perjalanan, negara transit, komunikasi darurat, dan koordinasi diplomatik. Untuk kapal niaga, Indonesia memerlukan pedoman menghadapi pemeriksaan, pengalihan, dan ancaman di zona konflik, termasuk batas peran kapal TNI Angkatan Laut dalam pengawalan atau bantuan kemanusiaan.

Pelajaran keempat adalah pengelolaan eskalasi. Kepentingan Indonesia adalah mempertahankan kebebasan navigasi, stabilitas perdagangan, dan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa terseret dalam rivalitas militer. Diplomasi Indonesia dapat mendorong saluran komunikasi, akses kemanusiaan, perlindungan pelayaran netral, dan pencegahan perluasan operasi ke kawasan Asia Tenggara. Implikasi ini menunjukkan bahwa kontingensi Taiwan perlu dimasukkan dalam latihan dan perencanaan keamanan maritim nasional secara lintas lembaga.

KESIMPULAN

Potensi blokade terhadap Taiwan merupakan kampanye multidomain yang dapat berkembang dari zona abu-abu dan karantina menuju blokade gabungan, serangan terhadap pelabuhan, dan transisi ke invasi. Penggunaan penjaga pantai, angkatan laut, kekuatan udara, rudal, siber, serta operasi informasi memungkinkan tekanan ditingkatkan secara bertahap sekaligus mengaburkan batas dimulainya konflik bersenjata.

Kontribusi penelitian ini adalah konsep penyangkalan efektivitas blokade. Strategi tersebut memperluas *sea denial* dari penghancuran platform lawan menuju pemeliharaan fungsi minimum nasional. Lima pilarnya adalah kesadaran domain maritim dan komando yang tangguh, kekuatan tempur terdistribusi, ketahanan pelabuhan-energi-logistik, kesiapan pelayaran niaga dan konvoi, serta integrasi militer-diplomatik-hukum. Blokade dinilai gagal apabila lawan tidak mampu menutup akses secara konsisten, mematikan pelabuhan, dan mematahkan kemauan politik.

Taiwan dan negara mitra direkomendasikan melakukan latihan blokade lintas sektor, memperkuat pelabuhan alternatif, menyebarkan persediaan, membangun kontrak darurat dengan perusahaan pelayaran, serta menetapkan indikator perubahan dari karantina ke blokade bersenjata. Indonesia direkomendasikan memasukkan kontingensi Taiwan dalam perencanaan perlindungan jalur komunikasi laut, ketahanan rantai pasok, evakuasi warga negara, dan latihan koordinasi keamanan maritim lintas lembaga.

REFERENSI

- Biddle, S., & Oelrich, I. (2016). Future warfare in the Western Pacific: Chinese antiaccess/area denial, U.S. AirSea Battle, and command of the commons in East Asia. *International Security*, 41(1), 7-48. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00249
- Cancian, M. F., Cancian, M. F., & Heginbotham, E. (2025). Lights out? Wargaming a Chinese blockade of Taiwan. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/lights-out-wargaming-chinese-blockade-taiwan>
- Cunningham, F. S. (2020). The maritime rung on the escalation ladder: Naval blockades in a U.S.-China conflict. *Security Studies*, 29(4), 730-768. <https://doi.org/10.1080/09636412.2020.1811462>
- Davis, K., & Gholz, E. (2026). Blockade by fire: China's potential to blockade Taiwan using missile attacks on ports. *International Security*, 50(4), 176-231. <https://doi.org/10.1162/ISEC.a.407>
- Doswald-Beck, L. (Ed.). (1995). San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea. Cambridge University Press. <https://ihl-databases.icrc.org/assets/treaties/560-IHL-89-EN.pdf>

- Hammes, T. X. (2012). Offshore control: A proposed strategy for an unlikely conflict (Strategic Forum No. 278). National Defense University Press.
<https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-278.pdf>
- Henley, L. D. (2023). Beyond the first battle: Overcoming a protracted blockade of Taiwan (China Maritime Report No. 26). China Maritime Studies Institute, U.S. Naval War College.
<https://digital-commons.usnwc.edu/cmsi-maritime-reports/26/>
- Kepe, M., & Harold, S. W. (2025). Building Taiwan's resilience: Insights into Taiwan's civilian resilience against acts of war (Research Report RR-A3388-1). RAND Corporation.
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3388-1.html
- Lin, B., Hart, B., Funaiole, M. P., Lu, S., & Tinsley, T. (2024a). How China could quarantine Taiwan: Mapping out two possible scenarios. Center for Strategic and International Studies.
<https://www.csis.org/analysis/how-china-could-quarantine-taiwan-mapping-out-two-possible-scenarios>
- Lin, B., Hart, B., Funaiole, M. P., Lu, S., & Tinsley, T. (2024b). How China could blockade Taiwan. Center for Strategic and International Studies.
<https://features.csis.org/chinapower/china-blockade-taiwan/>
- Murray, W. S. (2008). Revisiting Taiwan's defense strategy. Naval War College Review, 61(3), 13-38. <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol61/iss3/3/>
- U.S. Department of Defense. (2025). Military and security developments involving the People's Republic of China 2025: Annual report to Congress. Office of the Secretary of Defense.
<https://media.defense.gov/2025/Dec/23/2003849070/-1/-1/1/ANNUAL-REPORT-TO-CONGRESS-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2025.PDF>